

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)

Lia Kusumaningrum¹, Kiki Dwi Wulandari², Faradilah Farid Karim³, Nurika Arum Sari⁴

^{1,2}Prodi Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret

³Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat

⁴Prodi Rekayasa Kehutanan, Institut Teknologi Sumatera

email: liakusumaningrum@staff.uns.ac.id

Abstrak

Sampah merupakan masalah sosial dimana dengan berjalannya waktu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Persampahan di Kabupaten Kudus menjadi salah satu permasalahan dari dampak meningkatnya jumlah penduduk, pesatnya pembangunan dan industri di Kabupaten Kudus. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus bukan hanya tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Kinerja Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dinilai belum optimal. Berlakunya UU No 18/2008 tentang pengelolaan sampah agar pemerintah kota/kabupaten dapat mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan sampah optimal oleh Dinas PKPLH. Penelitian bertujuan memberikan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat menekan timbulan sampah sesuai dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan wawancara informan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis menggunakan analisis SWOT mengkaji kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), serta Uji Litmus. Dari hasil penelitian didapatkan strategi pengelolaan sampah yang segera dilakukan tindakan oleh Dinas PKPLH yakni meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui proses daur ulang yang terpadu sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi, serta diperlukan pengadaan sarana dan prasarana, selain itu perlu memperbaiki, merawat sarana dan prasarana persampahan yang sudah ada di Kabupaten Kudus oleh Dinas PKPLH guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya diperlukan komitmen yang kuat antara masyarakat dan Dinas PKPLH agar persoalan pengelolaan sampah dapat teratasi.

Kata Kunci : Analisis SWOT, Pengelolaan Sampah, Sampah

Abstract

Garbage is a social problem where over time it can cause inconvenience and anxiety to the community if it is not managed properly. Garbage in Kudus Regency is one of the problems from the impact of increasing population, rapid development and industry in Kudus Regency. Waste management in Kudus Regency is not only the responsibility of the Department of Housing, Residential Areas and Environment (PKPLH), but also the responsibility of the entire community of Kudus Regency. The performance of PKPLH Department Kudus Regency is considered not optimal. The enactment of Law decree No. 18/2008 concerning waste management so that regency government can change the waste disposal system into a waste management system. This study examines the optimal waste management strategy by the PKPLH office. The research aims to provide the right strategy in waste management so that it can reduce waste generation in accordance with the law that has been set. This study uses a descriptive qualitative approach through field observations and interviews with informants using purposive sampling technique. The analysis technique using SWOT analysis examines strengths (S), weakness (W), opportunities (O) and threats (T), as well as the Litmus Test. From the results of the research, it was found that a waste management strategy was immediately taken action by the PKPLH service, namely increasing the capacity of human resources in an effort to change people's perceptions, attitudes and behavior in waste management through an integrated recycling process so that waste can be reused into raw materials with economic value, and it is necessary to procure facilities and infrastructure, besides that it is necessary to repair and maintain existing waste facilities and infrastructure in Kudus Regency by the PKPLH Department service in order to improve services

to the community. In practice, a strong commitment is needed between the community and the PKPLH Department so that the problem of waste management can be resolved.

Keywords: SWOT Analysis, Waste Management, Waste

PENDAHULUAN

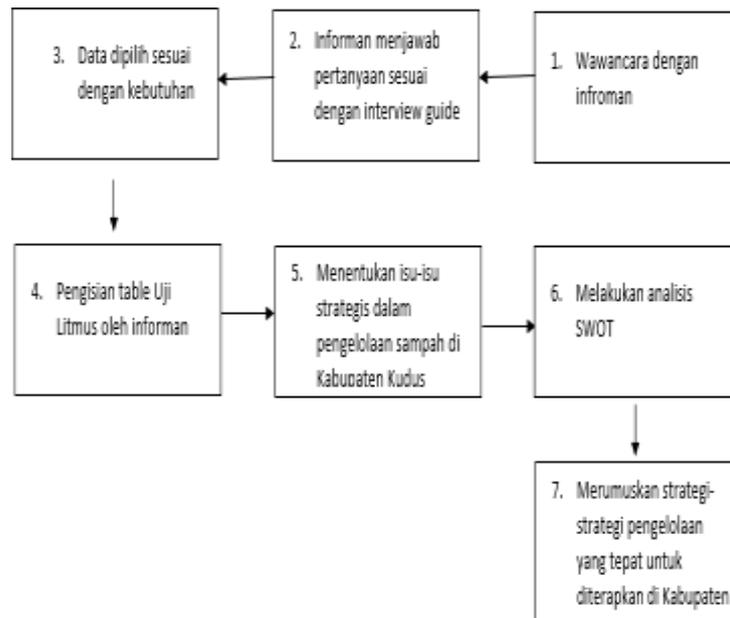
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan problem atau masalah sosial dimana dengan berjalannya waktu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Sampah-sampah dalam jumlah banyak dan tidak dikelola akan memberikan dampak kurang baik bagi seluruh aspek kehidupan makhluk hidup (Sukerti dkk, 2017). Sampah dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan, seperti merusak estetika, membuat pencemaran baik tanah, air, udara, rusaknya berbagai ekosistem, dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah saat ini didasarkan pada UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dengan dua fokus utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan pada UU maupun PP dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Dimana hal tersebut dapat diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah.

Persampahan di Kabupaten Kudus menjadi salah satu permasalahan dari dampak meningkatnya jumlah penduduk, pesatnya pembangunan dan industri di Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya sampah dari tahun ke tahun. Menurut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH), jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2019 sebesar 871.311 jiwa, dengan jumlah timbulan sampah 435.84 ton/hari dan 159.083,24 ton/tahun. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebesar 849.184 jiwa, namun jumlah timbulan sampah tetap mengalami peningkatan yakni timbulan 440.89 ton/hari dan 160.924,12 ton/tahun.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus bukan hanya tanggungjawab Dinas PKPLH saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Kinerja Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dinilai belum optimal. Dilihat dari jumlah penduduk yang berkurang tetapi tingkat kesadaran masyarakat masih kurang terkait permasalahan sampah. Sebagian besar masyarakat belum memahami tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, padahal peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah. Masyarakat masih saja membuang sampah di kali, selokan atau menimbunnya di pinggir jalan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah yang belum merata. Seharusnya Dinas PKPLH mampu memberikan pelayanan pengelolaan sampah dengan baik kepada masyarakat terkait pembinaan pengelolaan sampah. Berlakunya UU No 18/2008 tentang pengelolaan sampah agar pemerintah kota/kabupaten dapat mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan sampah optimal oleh Dinas PKPLH. Penelitian ini penting dilakukan agar Dinas PKPLH dapat melaksanakan pengelolaan sampah menggunakan strategi yang tepat sehingga dapat menekan pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Kudus pada bulan Juli- September 2022. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan teknik purposive sampling kepada informan yang berkompeten memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dari studi literatur, jurnal ilmiah atau arsip-arsip resmi dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membutuhkan alat yakni lembar wawancara, handphone untuk dokumentasi dan merekam hasil suara wawancara dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara. Bahan penelitian yakni informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis yaitu metode analisis SWOT dan Uji Litmus. Analisis SWOT dilandasi pada suatu keyakinan bahwa suatu strategi yang efektif mampu memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, selanjutnya dilakukan Uji Litmus untuk mengukur tingkat kestrategisan dari isu yang ada sehingga dapat menjadi suatu perencanaan strategis pada pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus oleh DPKPLH.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus bertanggung jawab atas sistem pengelolaan sampah yang dilakukan masing-masing TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di Kabupaten Kudus. Masing-masing TPS telah menerapkan sistem 3R dalam pengelolaan sampah, namun pada beberapa TPS mengalami kendala dalam pengangkutan karena beberapa alat pengangkutan sampah mengalami kerusakan dan juga masih banyak menggunakan transportasi manual yang dinilai kurang efisien dan kurang efektif. Sarana dan prasarana TPS kurang perawatan sehingga sering rusak sehingga mengganggu kinerja pelayanan. Masing-masing TPS Kabupaten Kudus telah menerapkan program Busadipa (buang sampah dibayar sampah), dimana warga akan memilah sampah plastik dan dapat ditukarkan dengan uang yang nantinya bisa digunakan sebagai pengganti uang redistribusi. Namun, kondisi masyarakat saat ini terkait pola pikir terhadap pengelolaan sampah masih kurang. Masih banyak warga yang memakai konsep pengelolaan sampah dengan sistem kumpul, angkut, buang. Hal ini menyebabkan volume sampah di TPS yang telah disediakan semakin menumpuk. Meski demikian sebagian masyarakat lainnya telah mengubah kebiasaan pengelolaan sampah tersebut dengan memilah sampah organik dan anorganik langsung dari sumber. Setelah mengetahui kondisi penerapan pengelolaan sampah di TPS Kabupaten Kudus. Selanjutnya dilakukan analisis lingkungan strategis pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Lingkungan strategis terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang nantinya akan dinilai guna mengidentifikasi apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Berikut analisis faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal berdasarkan hasil penelitian.

Tabel 1. Penilaian Lingkungan Internal

No	Penilaian Lingkungan	S	W	O	T
1	Kelembagaan				
	Kesesuaian visi dan misi kondisi	√			
	Dukungan stakeholder dalam pengelolaan sampah	√			
	Peran desa dalam membina masyarakat		√		
2	Wadah komunikasi		√		
	Anggaran				
	Anggaran yang terbatas		√		
	Belum meratanya pemberian		√		

	anggaran kepada TPS				
3	Teknik Operasional				
	Sarana dan prasarana yang belum menunjang		√		
	Pemasaran hasil produksi	√			
	TPA yang overkapasitas		√		

Tabel 2. Penilaian Lingkungan Eksternal

No	Penilaian Lingkungan	S	W	O	T
1	Hukum/peraturan				
	Tersedianya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah			√	
	Dukungan Bupati dalam penerapan pengelolaan sampah			√	
2	Sosial Budaya				
	Kesadaran masyarakat memilah dan mengelola sampah minimal				√
	Terdapat masyarakat yang belum terjangkau TPS				√
	Terdapat inisiatif masyarakat untuk pemasaran daur ulang sampah			√	

Berdasarkan pada analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dapat diketahui apa saja yang menjadi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman. Sehingga setiap kelemahan dan ancaman akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi yang akan dirumuskan dalam pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Sementara kekuatan dan peluang akan menjadi faktor pendukung strategi yang akan dirumuskan dalam pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Tahap selanjutnya dilakukan matriks SWOT yang akan digunakan untuk menganalisis lebih lanjut strategi yang dapat digunakan dan dijadikan landasan dalam penetapan perencanaan strategis pengelolaan samp

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT

	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi pengelolaan sampah di masing-masing TPS Dukungan stakeholder dalam pengelolaan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> Peran desa dalam membina masyarakat Wadah komunikasi Anggaran yang terbatas Belum meratanya pemberian anggaran kepada TPS Sarana dan prasarana yang belum menunjang Pemasaran hasil produksi Tempat Pengelolaan Akhir yang overkapasitas
Faktor Eksternal		

<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah 2. Ada dukungan Bupati dalam penerapan pengelolaan sampah 3. Sudah ada inisiatif masyarakat untuk pemasaran daur ulang sampah walaupun masih terbatas 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan visi dan misi dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah 2. Meningkatkan dukungan <i>stakeholder</i> yaitu Bupati 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk wadah komunikasi dengan bantuan Bupati 2. Memaksimalkan peran desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemasaran hasil produksi 3. Mengkoordinir hasil produksi dengan pemasaran daur ulang sampah walaupun masih terbatas
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim 2. Masih ada masyarakat yang belum terjangkau 3. Semakin tingginya timbunan sampah seiring peningkatan jumlah penduduk 	<p>STRATEGI S-T</p> <p>Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah</p>	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah 2. Pengadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Kudus guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan matrik SWOT (Tabel 3) menghasilkan beberapa strategi pengembangan berdasarkan SO, WO, ST, dan WT yang mana akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strength Opportunity)
 - a. Mengoptimalkan visi dan misi dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah yakni Dinas PKPLH mempunyai fungsi untuk menjalankan tupoksi dari regulasi peraturan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dengan dua fokus utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah.
 - b. Meningkatkan dukungan stakeholder yaitu Bupati. Diperlukan peran serta pemerintah yakni Bupati dalam membantu menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam kurun waktu tertentu dan memfasilitasi penerapan teknologi dan berbagai program untuk membantu dalam pengelolaan sampah di Daerah Kudus
2. Strategi WO (Weakness Opportunity)
 - a. Membentuk wadah komunikasi dengan bantuan Bupati. Masyarakat dan Dinas PKPLH membentuk suatu komunitas yang dapat memudahkan komunikasi dalam pengelolaan sampah misalnya Bank Sampah di Kabupaten Kudus dengan dukungan Bupati.
 - b. Memaksimalkan peran desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemasaran hasil produksi. Dinas PKPLH melakukan sosialisasi dan promosi secara berkala, serta membuat UMKM

- hasil kerajinan pengelolaan sampah.
- c. Mengkoordinir hasil produksi dengan pemasaran daur ulang sampah walaupun masih terbatas. Dalam pelaksanaannya masyarakat dapat melakukan kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan hasil produksi dengan pemasaran daur ulang sampah.
3. Strategi ST (Strength Threats)
 - a. Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat erkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menekankan pada pelibatan masyarakat dan Dinas PKPLH dalam sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk mewujudkan target pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
 4. Strategi W-T (Weakness Threats)
 - a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya mengubah persepsi,sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui proses daur ulang yang terpadu, sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi. Apabila sampah telah mulai dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk ditingkatkan nilai ekonominya melalui proses daur ulang akan mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat untuk mengelola timbulan sampah.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Kudus guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan persampahan maka Dinas PKPLH perlu melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan melakukan perawatan rutin dan berkala terhadap sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Kudus.

Setelah isu strategis dirumuskan, selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap isu strategis. Pada tahap ini akan diukur tingkat kestrategisan isu agar dapat diketahui seberapa besar kontribusi isu tersebut terhadap keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sebagai alat ukurnya dipergunakan alat uji litmus. Dibuat klasifikasi dan pemberian nilai bobot pada masing-masing jawaban untuk membantu proses pengukuran tingkat kestrategisan suatu isu dengan kriteria sebagai berikut:

 1. Jawaban yang sifatnya strategis diberikan nilai bobot 3
 2. Jawaban yang sifatnya moderat diberikan nilai bobot 2
 3. Jawaban yang sifatnya operasional diberikan nilai bobot 1

Untuk mengetahui penilaian dalam uji litmus dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Hasil Skor Uji Litmus

No	Isu strategis	Skor Pertanyaan Uji Litmus												Total Skor	
		1	2	3	4					5	6	7	8		9
					a	b	c	d	e						
1	Mengoptimalkan visi dan misi dengan adanya Perda tentang pengelolaan sampah	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	18
2	Meningkatkan dukungan <i>stakeholder</i> dengan memanfaatkan dukungan Bupati	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	17
3	Membentuk wadah komunikasi dengan bantuan Bupati	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	21
4	Memaksimalkan peran desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemasaran hasil produksi	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	20
5	Mengkoordinir hasil produksi dengan memanfaatkan dukungan Bupati	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	20

6	Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	19
7	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah	3	2	3	3	3	1	1	3	2	3	3	2	3		32
8	Pengadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Kudus guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	3	2	3	1	3	1	1	3	2	3	2	2	2		28

Dari hasil skoring identifikasi isu strategis pada Tabel 4, selanjutnya dibuat skoring untuk memprioritaskan isu-isu yang bersifat strategis, dengan rumusan sebagai berikut (Tabel 5):

1. Isu yang bersifat Operasional = 1-13, isu ini tidak memerlukan tindakan yang segera, tetapi perkembangannya tetap terus dipantau.
2. Isu yang bersifat Moderat = 14-26, isu ini dapat diselesaikan dengan mekanisme perencanaan strategi yang rutin.
3. Isu yang bersifat Strategis = 27-39, isu ini memerlukan tindakan segera dan juga dapat diselesaikan menggunakan mekanisme yang rutin.

Tabel 5. Hasil Klasifikasi Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Sifat Isu
1	Mengoptimalkan visi dan misi dengan adanya Perda tentang pengelolaan sampah	18	Moderat
2	Meningkatkan dukungan <i>stakeholder</i> dengan memanfaatkan dukungan Bupati	17	Moderat
3	Membentuk wadah komunikasi dengan bantuan Bupati	21	Moderat
4	Memaksimalkan peran desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemasaran hasil produksi	20	Moderat
5	Mengkoordinir hasil produksi dengan memanfaatkan dukungan Bupati	20	Moderat
6	Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	19	Moderat
7	Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah	32	Strategis
8	Pengadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Kudus guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	28	Strategis

Isu strategis yang memiliki skor paling tinggi dan harus segera dilakukan tindakan adalah meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku

masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta pengadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Kudus guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus diperlukan upaya berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat memiliki kepentingan sebagai pelaku utama penghasil sampah rumah tangga yang akan menjadi penerima manfaat dan dampak dalam pengelolaan sampah nantinya. Pemangku kepentingan yang terlibat yakni Bupati dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki kontribusi terhadap kondisi persampahan Kabupaten Kudus. Berbagai strategi pengelolaan sampah dapat dilakukan agar pengelolaan sampah menjadi optimal sesuai dengan mandat peraturan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dengan dua fokus utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

SIMPULAN

Pengelolaan sampah di Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dapat dikatakan masih belum maksimal karena masih adanya kendala-kendala dalam penerapannya. Strategi pengelolaan sampah oleh Dinas PKPLH untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera dilakukan tindakan yakni meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui proses daur ulang yang terpadu sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi, serta diperlukan pengadaan sarana dan prasarana, selain itu perlu memperbaiki, merawat sarana dan prasarana persampahan yang sudah ada di Kabupaten Kudus oleh Dinas PKPLH guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya diperlukan komitmen yang kuat antara masyarakat dan Dinas PKPLH agar persoalan pengelolaan sampah dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianita, R., Edwin, T., and Alawiyah A. 2017. Analisis Intrusi Air Laut Dengan Pengukuran Total Dissolved Solids (TDS) Air Sumur Gali di Kecamatan Padang Utara. *Journal Of Environmental Engineering*, 14(1): 62-72.
- Bryson, J.M. 2007. *Perencanaan Strategis bagi organisasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, M. Z. 2019. *Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan*. Amanna Gappa, 27(2), 111—121.
- Hartanto, R. 2008. *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*. Bogor, TPS.
- Irwan. 2017. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta, Absolute Media.
- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan Sampah dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 27—40.
- Mildayati, Achmad, A., & Idrus, M. R. 2021. Efektivitas Pengelolaan Sampah pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa. *Jurnal Sosio Sains*, 7(1), 83—95
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Rakhmat, J. 2000. *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?* Bandung: Rosda.
- Rangkuti, F. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukerti, N. L. G., Sudarmo, I. M., & Pujaastawa, I. B. G. 2017. Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Provinsi Bali. *Ecotrophic*, 11(2), 148—155
- Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk organisasi*. Jakarta: Grasindo
- Siagian, S.P. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.